

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu daerah dapat dikatakan berhasil perekonomiannya apabila masyarakatnya dapat merasakan hidup sejahtera, Untuk menggapai keberhasilan tersebut, setiap daerah harus memfokuskan perubahan pembangunan ekonominya. Jika pembangunan ekonomi suatu daerah berhasil maka dapat dilihat perkembangan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi menurut Prof. Simon Kuznets (Jhingan, 2012) merupakan nilai dari memproduksi barang dan jasa secara fisik yang berlaku di suatu daerah. Peningkatan secara fisik dapat dilihat dari tambahan barang produksi, tambahan produksi barang modal, tambahan jumlah sekolah, perubahan infrastruktur, serta bertambahnya sektor jasa. Setiap daerah harus menjaga kestabilan perekonomiannya agar dapat membawa daerahnya ke kehidupan yang lebih layak lagi, itulah alasan mengapa pertumbuhan ekonomi di setiap daerah sangat penting.

Ada berbagai macam cara pengukuran yang relevan untuk mengetahui perubahan perekonomian di daerah tersebut sehingga memudahkan pemerintah menilai keberhasilan ekonomi setiap daerah. Indikator untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di daerah biasanya, yaitu: 1. Pendapatan nasional riil; 2. pendapatan riil perkapita; 3. tenaga kerja dan pengangguran; dan 4. kesejahteraan penduduk. Tingkat pertumbuhan angka-angka regional dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini adalah indikatornya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan data *basic* yang bisa digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi, karena angka statistik ini didapatkan dari menjumlahkan nilai tambah bruto yang dihasilkan suatu perekonomian dari kegiatan produksi, lalu PDRB diukur atas dasar konsep aliran (*flow concept*), yang artinya angka PDRB hanya meliputi nilai produk

pada periode sebelumnya. Perhitungan pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk melihat adanya kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka pertumbuhan ekonomi sebaiknya dihitung dengan data PDRB perkapita atas dasar konstan (Susanti et al., 1995)

Tabel 1.1
Pertumbuhan Ekonomi ADHK, PDRB Per Kapita ADHK 2010 dan
Distribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Simalungun
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2020

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi ADHK (%)	PDRB Per Kapita ADHK 2010 (Rupiah)	Distribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)
2013	4.48	24.005.942	11.30
2014	5.33	25.110.728	11.65
2015	5.24	26.258.511	11.65
2016	4.40	27.512.314	11.96
2017	5.13	28.764.975	12.37
2018	5.18	30.098.897	12.40
2019	5.20	31.510.550	12.00
2020	1.01	31.692.547	11.54
2021	3.70	28.542.404	11.58

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun dalam periode 2013 hingga 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,33 persen kemudian pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Simalungun terendah pada tahun 2020 sebesar 1,01 persen.

Salah satu masalah makro ekonomi dalam jangka panjang yaitu adanya ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah. Tenaga kerja yang meningkat disebabkan karena adanya penambahan pertumbuhan penduduk,

pengalaman bekerja dan pendidikan yang mempengaruhi keterampilan mereka (Sadono Sukirno, 2013). Chamber mengungkapkan pemberdayaan ekonomi merupakan sebuah konsep ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial dengan kerangka berpikir baru dalam pembangunan yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”. Fungsi pemberdayaan ekonomi dapat digunakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, pemberdayaan ekonomi merupakan tanggung jawab sosial pemerintah terutama diperuntukkan bagi lembaga keuangan mikro (*mikrofinance*) (Lubis, 2016).

Peningkatan pendapatan atau PDRB perkapita penduduk mesti dipadukan dengan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dilaksanakan strategi ini secara serentak agar perkembangan pembangunan ekonomi dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Apabila aktivitas produksi dan investasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi dapat terwujud.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 hingga tahun 2021 rata-rata PDRB perkapita Kabupaten Simalungun sebesar Rp 28,166,319,00. PDRB perkapita Kabupaten Simalungun mengalami naik turun dari tahun 2013 hingga 2021.

Pada Tabel 1.1 sektor yang berperan besar terhadap PDRB Kabupaten Simalungun tahun 2021 yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 51,34 persen, perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,85 persen serta industri pengolahan sebesar 11,58 persen. Dengan banyaknya kegiatan industri di Kabupaten Simalungun. Sektor industri pengolahan menempati peringkat ketiga setelah sektor perdagangan besar dan eceran yang menyerahkan kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Simalungun tahun 2021.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi secara agregat di suatu daerah dalam satu tahun. Melihat dan memperhatikan laju pertumbuhan ekonomi yang telah tercapai dari tahun-tahun

sebelumnya dapatlah ditentukan prestasi dan keberhasilan wilayah tersebut dalam mengoptimalkan dalam waktu singkat dan upaya pengembangan kegiatan ekonomi dalam waktu lama (Sadono Sukirno, 2013).

Dalam meningkatkan mutu hidup masyarakat, industri berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berlangsung secara terus menerus agar memperluas kesempatan kerja dan memberikan penambahan lapangan usaha, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, meminimalisir masyarakat dari kemiskinan, serta mendorong pembangunan daerah. Maka sektor industri dapat dikatakan sebagai salah satu sektor penyumbang PDRB di suatu Negara (Harahap *et al.*, 2021).

Pola pemusatan industri atau aglomerasi adalah salah satu faktor yang dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, timbulnya pertumbuhan ekonomi baru di suatu daerah bisa terjadi karena berkumpulnya berbagai sektor/industri ke dalam di daerah tersebut. Francois perroux (1950) dan boudeville (1972) dalam teori pusat pertumbuhan (*growth centre*) mengungkapkan bahwa aglomerasi merupakan sarana untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi (*trickle down effect*). Kenyataannya, teori Perroux mengungkapkan bahwa sering terjadi tindakan aglomerasi (pemusatan) pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan cenderung terjadi ketidakmerataan hal ini jika diamati dari aspek pembangunan ekonomi di daerah. daerah-daerah yang lambat perkembangannya dapat merasakan dampak dari pusat pertumbuhan tersebut. Terdapat pengaruh positif dengan adanya pemusatan industri antara lain: 1. Adanya keuntungan skala ekonomis, dan 2. Adanya keuntungan dalam penghematan biaya (Lincoln Arsyad, 2015).

Menurut Richardson, mengatakan bahwa aglomerasi industri berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan harga bahan baku dan faktor produksi, dan mengakibatkan biaya per unit naik dan timbulnya relokasi aktivitas ekonomi ke daerah lain yang belum mencapai skala produksi maksimal (Eko Pambudi, 2013).

Selain aglomerasi, angkatan kerja juga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Todaro dan Stephen C. Smith (2006) menyatakan bahwa secara sederhana pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja memiliki positif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi dapat terjadi karena tingginya jumlah tenaga kerja, jika ukuran domestiknya besar maka pertumbuhan penduduk di daerah tersebut lebih besar. Meskipun angkatan kerja juga mempunyai negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal tersebut tergantung pada kemampuan pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian setiap daerah dalam menyerap dari pertambahan pertumbuhan penduduk dan memanfaatkannya sebagai tenaga kerja.

Gambaran kondisi dari jumlah angkatan kerja yang bekerja dilihat dari tersedianya lapangan kerja. Dalam meningkatkan produksi disuatu wilayah membutuhkan tersedianya lapangan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui banyaknya ketenagakerjaan di Indonesia. Total angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai persentase penduduk diperoleh dengan membandingkan jumlah angkatan kerja dengan jumlah tenaga kerja, hal tersebut dilihat dari Tingkat partisipasi angkatan kerja (Trias Fajar Novianto, 2013).

Angkatan kerja dan bukan angkatan kerja merupakan bagian dari tenaga kerja. Penduduk usia kerja yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetapi menganggur sementara, atau sedang aktif mencari pekerjaan merupakan angkatan kerja. Tenaga kerja atau penduduk usia kerja yang tidak bekerja, yaitu mereka yang kegiatannya sekolah (pelajar dan mahasiswa), mengurus keluarga, dan memperoleh penghasilan tetapi bukan upah langsung atas jasa kerjanya, tidak termasuk dalam angkatan kerja. (Dumairy, 1996).

Tabel 1.2
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Angkatan Kerja dan
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Simalungun Tahun 2013-2021

Tahun	Angkatan Kerja (Jiwa)			Indeks Pembangunan Manusia (%)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
2013	381.657	22.451	404.108	70.28
2014	368.425	29.803	398.228	70.89
2015	389.413	23.741	413.154	71.24
2016	389.413	23.741	413.154	71.48
2017	393.218	23.416	416.634	71.83
2018	420,842	22,636	443,478	72,49
2019	416,910	19,147	436,057	72,98
2020	439,251	21,068	460,319	73,25
2021	449,676	19,543	469,219	73,40

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Simalungun dari tahun 2013 hingga tahun 2021 mengalami naik turun setiap tahunnya akan tetapi cenderung meningkat. Dimana pada tahun 2021 memiliki 449,676 jiwa yang merupakan jumlah angkatan kerja terbesar sembilan tahun terakhir dan di tahun 2014 jumlah angkatan kerja lebih kecil daripada tahun yang lain yaitu sebesar 398.228 jiwa. Dengan demikian semakin besar jumlah angkatan kerja sebaiknya dapat dijadikan instrument oleh pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya mendukung keberhasilan dalam mengembangkan keuangannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas menentukan kinerja industri.

Kualitas SDM yang relevan untuk pengembangan usaha yang berlandaskan nilai-nilai syariah tentunya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang memadai di industri serta komitmen moral dan integritas untuk mengelola industri ini (Batubara & Harahap, 2022). Investasi pada modal manusia dapat berdampak pada ekspansi ekonomi. Jika suatu daerah memiliki modal fisik dan manusia yang cukup, ekonominya akan tumbuh lebih sukses. Meier dan Stiglitz berpendapat bahwa peningkatan pengetahuan, kesejahteraan, gizi, dan tingkat keterampilan dapat membuat organisasi pembangunan lebih efektif dan membantu memacu pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan untuk pengamatan investasi modal manusia.

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa persentase IPM di Kabupaten Simalungun tahun 2013-2021 dimana rata-rata IPM terbesar tahun 2021 yakni sebesar 73,40, melainkan tahun 2013 memiliki rata-rata IPM paling rendah yakni sebesar 70,28. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Simalungun berada pada posisi ke-11 dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Nilai IPM Simalungun masih diatas nilai IPM Sumatera Utara yang bernilai 72,00 tahun 2021.

Menurut Ramirez (1998), ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan investasi modal manusia (hubungan dua arah). Kaitan tersebut terdiri dari: 1) Pertumbuhan ekonomi hingga investasi modal manusia; 2) investasi modal manusia ke dalam pertumbuhan ekonomi; ini memiliki efek samping yang menarik bahwa orang-orang berpendidikan akan mendukung pertumbuhan ekonomi, yang merupakan salah satu cara GNP mempengaruhi pembangunan manusia. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, kita dapat mendorong masyarakat untuk menempuh pendidikan yang layak dan berdampak positif bagi perekonomian (Tulus T.H Tambunan, 2009).

Secara khusus, variabel aglomerasi yang terjadi ketika terjadi pemusatan kegiatan industri di suatu kawasan diperkirakan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan industri tersebut dan berpengaruh positif terhadap kawasan lain yang berada di sekitarnya. Faktor tenaga kerja, yang membantu dalam memperoleh produk dan jasa untuk pertumbuhan daerah, dan investasi modal manusia, yang merupakan modal manusia yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan HDI. Pengaruh aglomerasi, angkatan kerja, dan investasi modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun perlu dibuktikan dalam sebuah penelitian yang diharapkan dapat membantu mengkaji pengaruh keempat faktor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi akhirnya berdampak pada ekonomi lokal. Berdasarkan uraian di atas, penulis memutuskan untuk mengeksplorasi topik tersebut: **Pengaruh Aglomerasi, Angkatan Kerja Dan *Human Capital Investment* Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka diperoleh permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Simalungun dalam kurun waktu 2013-2021 mengalami fluktuasi
2. Nilai PDRB kabupaten/kota Simalungun yang cenderung mengalami naik turun pada tahun 2013-2021
3. Jumlah produksi yang dihasilkan industri pengolahan kabupaten/kota Simalungun mengalami naik turun pada tahun 2013-2021
4. Jumlah angkatan kerja kabupaten/kota Simalungun dari tahun 2013-2021 mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat
5. Nilai IPM mengalami peningkatan setiap tahunnya

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dan penyesuaian terhadap berbagai aspek, maka penulis mengusulkan batasan yang mengakibatkan batasan waktu penelitian yaitu tahun 2013–2021 dimana penelitian dilakukan yaitu di Kabupaten Simalungun, dan untuk menghindari penyimpangan dalam memahami skripsi ini. Fokus kajian ini adalah pada isu aglomerasi, angkatan kerja, dan *human capital investment* serta bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka diperoleh rumusan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah Aglomerasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun?
2. Apakah Angkatan Kerja berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun?
3. Apakah *Human Capital Investment* berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun?
4. Apakah Aglomerasi, Angkatan Kerja dan *Human Capital Investment* berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan studi ini adalah untuk mengumpulkan informasi rinci dan menawarkan dukungan empiris untuk pengaruh Aglomerasi, Angkatan Kerja dan *Human Capital Investment* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun. Dengan mempertimbangkan konteks dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Aglomerasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui pengaruh Angkatan Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Human Capital Investment* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun.
4. Untuk mengetahui pengaruh Aglomerasi, Angkatan Kerja dan *Human Capital Investment* terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Simalungun

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan melakukan penelitian ini

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan pada rumpun ilmu ekonomi makro sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran baik pada saat perkuliahan maupun dalam melakukan penelitian tambahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi para pengambil keputusan sebagai narasumber bagi lembaga-lembaga terkait, khususnya pusat dan daerah, dalam merumuskan kebijakannya.
- b. Bagi dunia akademika, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi rasio terhadap objek penelitian yang sama maupun sebagai referensi kepustakaan.
- c. Bagi penulis, sebagai media dalam pengaplikasian ilmu yang diperoleh sejak duduk di bangku kuliah dan sebagai tugas akhir untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Ekonomi Islam UIN Sumatera Utara.